



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DPPKBP3A
KABUPATEN
BANYUMAS

2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2023



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS

IKHTISAR EKSEKUTIF

Puji syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan ini sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan satu tahun ke depan.

Adapun capaian indikator kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA
1.	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,77%	0.796 %	155,03	Sangat Tinggi
2.	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,01 %	0,015%	150	Sangat Tinggi
3.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,94	72,77	101,15	Sangat Tinggi
4.	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	650	543	83,54	Sedang

Kemudian Capaian realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Keterangan (%)
DINAS		29.387.164.288	28.155.387.261	95,81
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	620.000.000	605.104.000	97,60
2.	Program Perlindungan Perempuan	225.604.000	199.920.509	88,62
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	77.000.000	75.545.500	98,11
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	7.000.000	6.346.000	90,66
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	160.000.000	159.579.100	99,74
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	218.600.000	204.428.845	93,52
7.	Program Pengendalian Penduduk	672.600.000	604.257.298	89,84
8.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	11.564.691.500	10.679.010.484	92,34
9.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	8.569.291.000	8.540.752.822	99,67
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	7.272.377.788	7.080.442.703	97,36
UPTD		99.596.000	90.896.615	91,27
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	25.000.000	19.060.615	76,24
2	Program Perlindungan Khusus Anak	74.596.000	71.836.000	96,30
Jumlah		29.486.760.288	28.246.283.876	95,80

Demikian LKjIP ini Kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Purwokerto, 31 Januari 2024

KEPALA DPPKBP3A

KABUPATEN BANYUMAS



KRISianto, A.P.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740321 199501 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	2
C. SUSUNAN ORGANISASI	4
D. SUMBER DAYA APARATUR	6
E. ISU STRATEGIS	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS	9
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	13
C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	19
C. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN DPPKBP3A	24
D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN	29
BAB IV PENUTUP	31
A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA	31
B. PROGRES CAPAIAN ISU-ISU STRATEGIS	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai (PNS/CPNS) Berdasarkan Golongan pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2022	6
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2022	6
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.....	12
Tabel 2.2	Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2022	14
Tabel 2.3	Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Program dan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2022	15
Tabel 3.1	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2022	18
Tabel 3.2	Predikat Kinerja.....	19
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 dan tahun 2022.....	20
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dengan Target Renstra..	20
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2021 dan tahun 2022.....	23
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dengan Target Renstra..	24
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022	26

Tabel 3.8	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2022	27
Tabel 3.9	Tingkat Efisiensi Capaian Sasaran Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2022	28
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran berdasarkan Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	STRUKTUR ORGANISASI DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS	5
----------	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Sebagai laporan, Laporan Kinerja Tahunan adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun;
3. Sebagai laporan akuntabilitas, Laporan Kinerja Tahunan merupakan wujud tertulis pertanggung-jawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat;
4. Laporan Kinerja Tahunan berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategis dalam

mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi instansi pemerintah dengan membandingkan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD;

5. Laporan Kinerja Tahunan merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan;
6. Laporan Kinerja Tahunan juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dilatarbelakangi hal-hal tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai salah satu instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas, juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

B. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut (DPPKBP3A) memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, sebagai berikut:

1. Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas:
 - a. DPPKBP3A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dipimpin oleh

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Selanjutnya, Tugas dan Fungsi DPPKBP3A adalah sebagai berikut:

a. Tugas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah yang diberikan kepada kabupaten.

b. Fungsi.

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Advokas, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- 3) Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- 4) Pelaksanaan administrasi kedinasan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

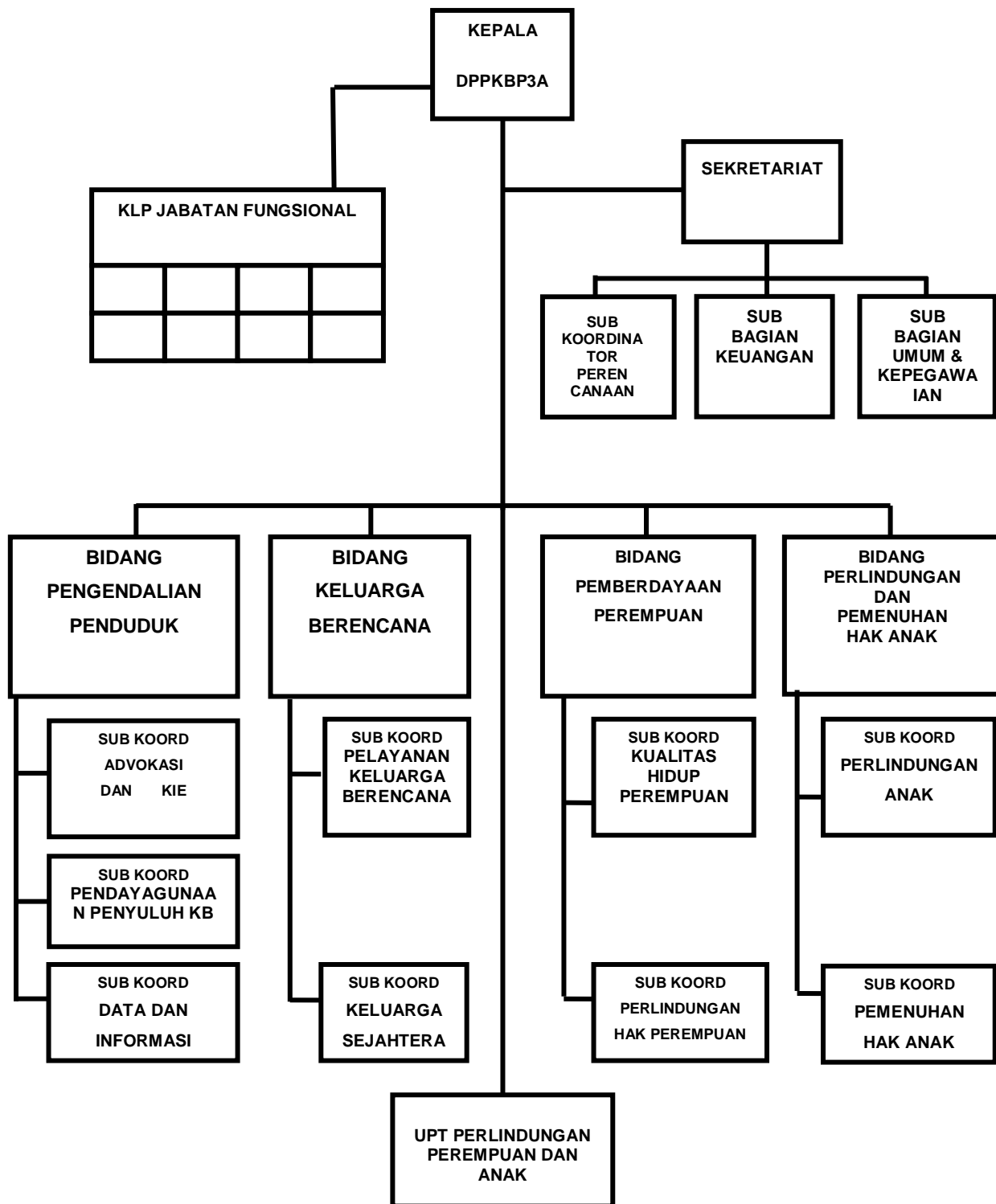
C. SUSUNAN ORGANISASI

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, DPPKBP3A berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Koordinator Perencanaan.
- 3) Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
 - a) Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - b) Sub Koordinator Pendayagunaan Penyuluh Berencana;
 - c) Sub Koordinator Data dan Informasi.
- 4) Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a) Sub Koordinator Pelayanan Keluarga Berencana;
 - b) Sub Koordinator Keluarga Sejahtera.
- 5) Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - a) Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan;
 - b) Sub Koordinator Perlindungan Hak Perempuan
- 6) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari :
 - a) Sub Koordinator Perlindungan Anak, dan
 - b) Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak.
- 7) UPTD; dan
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya, struktur organisasi DPPKBP3A Kabupaten Banyumas yang ditampilkan berdasarkan gambar bagan organisasi adalah sebagaimana gambar 1 berikut ini:

Gambar 1
STRUKTUR ORGANISASI
DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS



D. SUMBER DAYA APARATUR

Kondisi sumber daya aparatur pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai (PNS/CPNS) Berdasarkan Golongan pada
DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2022

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
1	Golongan I	-	-	-	-
2	Golongan II	2	1	3	9,68
3	Golongan III	5	15	20	64,52
4	Golongan IV	2	6	8	25,80
Jumlah				31	100

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPPKBP3A Kab. Banyumas, 2023

2. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	PNS/CPNS		Non PNS		Jumlah	Proporsi (%)
		L	P	L	P		
1	SD	-	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	1	-	1	-	2	3,46
3	SMA Sederajat	3	1	6	3	13	23,54
4	D1	-	-	-	-	-	-
5	D2	-	-	-	-	-	-
6	D3	1	1	1	3	6	11
7	S1	3	15	3	7	28	51
8	S2	1	5	-	-	6	11
Jumlah		9	22	11	13	55	100

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPPKBP3A Kab. Banyumas, 2023

E. ISU STRATEGIS

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. DPPKBP3A mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah yang diberikan kepada kabupaten.

Pada tahun 2023, isu kependudukan masih menjadi hal yang sangat strategis, mengingat pertumbuhan penduduk masih bertambah seiring berjalannya waktu. Pertambahan penduduk tersebut tentunya berdampak pada banyak hal yang secara tidak langsung menjadi permasalahan hampir bagi setiap daerah seperti kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, terbatasnya akses pendidikan dan lain-lain. Yang masih menjadi bahasan utama, isu *stunting* juga menjadi bahasan yang selalu menjadi perhatian bagi Pemerintah mulai tingkat Pusat hingga Daerah.

Penanganan *stunting* yang dilaksanakan oleh DPPKBP3A Kabupaten Banyumas merupakan pelaksanaan upaya-upaya pencegahan *stunting* (intervensi spesifik) yang dilaksanakan melalui pendekatan pada kelompok-kelompok kegiatan yang ada di masyarakat yang erat terkait dalam program KKBPK. Perhatian pemerintah yang semakin besar terhadap permasalahan *stunting*, menjadikan peran DPPKBP3A Kabupaten Banyumas menjadi krusial karena menjadi perangkat daerah yang langsung terlibat dalam upaya pencegahan *stunting* tersebut. Sehingga pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi atas penanganan *stunting* tersebut menjadi hal yang perlu dipertanggungjawabkan dengan baik pelaporannya.

Isu-isu strategis/ permasalahan

- ✓ Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (0,95 % di tahun 2021 dan 0,93% Tahun 2022 data dari BPS);

- ✓ Masih tingginya angka *stunting* di Kabupaten Banyumas, yaitu sebesar 21,6%;
- ✓ Kesetaraan gender belum maksimal, ditunjukkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender yang menurun (IDG= 70,10 di tahun 2021 ; 72,77 di tahun 2022) selain itu, proporsi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD masih rendah sebesar 22 % (11 orang) serta korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi (korban perempuan 47 orang ; korban anak 74 orang);
- ✓ Pencapaian nilai Kabupaten Layak Anak belum optimal (2021 = 595, 2022= 543) belum mencapai jenjang Madya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimulai dari perencanaan yang baik pula. Perencanaan strategis di Pemerintah Kabupaten Banyumas dilakukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dalam hal ini adalah Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Perencanaan yang dimaksud dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan lingkungan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

1. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas

Visi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 adalah “**Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri**”. Untuk melaksanakan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat;

- b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
- h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

2. Misi Kepala Daerah yang Terkait dengan DPPKBP3A

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2018-2023 sebagai wujud perencanaan strategis kepala daerah terpilih. Berdasarkan Misi dan Program Kepala Daerah terpilih tersebut di atas, yang memiliki keterkaitan dan mendukung tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- Misi kedua Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yaitu “ *Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok* ”

yang dilaksanakan melalui Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak serta Program Perlindungan Khusus Anak.

Adapun Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat yang berwawasan Kependudukan, Gender dan Anak ”

Kemandirian masyarakat adalah masyarakat yang mempunyai kapasitas mengelola potensi sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Berwawasan Kependudukan adalah meningkatkan mutu dan kualitas penduduk itu sendiri, selain menjadikan penduduk sebagai subyek dan obyek pembangunan. Karena jumlah penduduk yang banyak dan tidak dibarengi dengan mutu serta kualitas yang dimiliki akan menjadi beban dalam pembangunan. Berwawasan Gender dan Anak adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

3. IKU (Indikator Kinerja Utama) DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Rencana Strategis periode 2018-2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas diwujudkan dalam perencanaan secara 5 (lima) tahunan sebagai wujud penjabaran perencanaan strategis kepala daerah sebagaimana tersebut di atas. Rencana Strategis DPPKBP3A Kabupaten Banyumas juga telah mengalami evaluasi pada saat terjadinya wabah *Covid 19*. Wujud DPPKBP3A dalam menjalankan misinya tertuang dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yaitu:

a. Tujuan

- 1) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk;
- 2) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.

b. Sasaran

- 1) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk;
- 2) Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan;
- 3) Meningkatkan kualitas perlindungan anak.

Tujuan dan Sasaran strategis perangkat daerah DPPKBP3A tersebut kemudian diwujudkan dalam Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas

No.	Tujuan	Indikator Sasaran	Penjelasan
1	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Formulasi : (Jumlah penduduk tahun n - jumlah penduduk tahun n-1) : jumlah penduduk tahun n-1 x 100% Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dindukcapil Kab. Banyumas
2	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Formulasi : Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : BPS
		Nilai Kabupaten Layak Anak	Formulasi : Capaian nilai indikator Kabupaten Layak Anak Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Data yang terkait Kabupaten Layak Anak di DPPKBP3A Kab. Banyumas

Sumber: Dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian atau tingkat capaian kinerja program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam rangka mewujudkan pembangunan di bidang kesehatan yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Banyumas.

Target yang ingin dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Penduduk adalah 1,77% ;
2. Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk adalah 0,01 % ;
3. Indeks Pemberdayaan Gender adalah 71,94 ;
4. Nilai Kabupaten Layak Anak adalah 650.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pelaksanaan Rencana Strategis periode 2018-2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas secara tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja

Tahun 2023 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas yang memuat tentang tujuan, sasaran dan program kegiatan. Secara ringkas Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023 (RKT). Rencana Kinerja Tahunan tersebut memuat sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode waktu 1 (satu) tahun, indikator dan target kinerja yang akan digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran strategis yang bersangkutan. Sejalan dengan adanya dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2023 dalam rangka mewujudkan target yang tertuang di dalam RKT, maka disusun Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dengan Bupati Tahun 2023.

Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja tertentu, berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja ini menjadi Kontrak Kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat struktural/eselon di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai penerima amanah, dimana pada setiap akhir tahunnya akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja serta penilaian terhadap para pejabatnya.

Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dengan Bupati Tahun 2023 memuat perjanjian kinerja yang akan dicapai baik sesuai indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan sasaran strategis maupun

anggaran yang telah disahkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sebagaimana tertuang pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan	Satuan	Target
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	Formulasi : (Jumlah penduduk tahun n - jumlah penduduk tahun n-1) : jumlah penduduk tahun n-1 x 100% Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dindikcapil Kab. Banyumas	%	1,77
2		Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	Formulasi : (Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tahun n-1) - (Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tahun n) Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Dindikcapil Kab. Banyumas	%	0,01
3	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Formulasi : Nilai Indeks Pemberdayaan Gender Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : BPS	Indeks	71,94
4		Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak	Formulasi : Capaian nilai indikator Kabupaten Layak Anak Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber data : Data yang terkait layak anak di DPPKBP3A Kab. Banyumas	Nilai	650

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2022 (RKT) selaras dengan isi dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dengan Bupati Tahun 2023 yang dibuat pada awal tahun memuat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja yang diampu oleh 10 program dengan 24 kegiatan dan total anggaran pada DPA Induk sebesar Rp. **28.066.026.117,00** .

Pada periode tahun 2023, dalam rangka efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, mengalami beberapa kali pergeseran anggaran yang dikarenakan:

- Adanya kebutuhan anggaran dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- Adanya perintah/ mandatory perubahan nomenklatur kegiatan sesuai juklak dan juknis yang keluar dari Instansi yang mengeluarkan Dana Transfer Pusat (DAK).

Selanjutnya pada Bulan Oktober 2023 ditetapkanlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2023, berjumlah 24 kegiatan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, sehingga total anggaran perubahan belanja langsung yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir tahun 2023 bertambah menjadi sebesar Rp. **29.486.760.288,00**. Sehingga selisih penambahan anggaran pada perubahan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 1.420.734.171,00. Secara lengkap terkait anggaran tahun 2023 sebagaimana tertuang pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Program dan Anggaran
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2023

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Pengendalian Penduduk	672.600.000,00
2.	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	11.564.691.500,00
3.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	8.569.291.000,00
4.	Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	620.000.000,00
5.	Perlindungan Perempuan	225.604.000,00
6.	Peningkatan Kualitas Keluarga	77.000.000,00
7.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	7.000.000,00
8.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	160.000.000,00
9.	Perlindungan Khusus Anak	293.196.000,00
10.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah+ UPTD	7.297.377.788,00
Jumlah		29.486.760.288,00

Sumber: DPPA Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Indikator kinerja yang tercantum pada lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas merujuk pada Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang termasuk dalam indikator kinerja, melalui pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana, Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas

Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak. Target yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja di atas juga berdasarkan pada target tahun 2023 yang ingin dicapai sesuai RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

a. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, sebagaimana tertuang di dalam dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2023, dengan 4 indikator kinerja utama yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaiannya. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, mengampu 10 program dimana secara langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Program yang secara langsung dan memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian 4 indikator kinerja sasaran strategis, yaitu:

- a. Program Pengendalian Penduduk;
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana;
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- d. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Program Perlindungan Perempuan;
- f. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- g. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- h. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- i. Program Perlindungan Khusus Anak;
- j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pembinaan KB bersumber pada Dana Transfer Pusat yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOKB dan DAK Fisik Reguler-Bidang Kesehatan Sub Bidang KB. Demikian juga sebagian besar kegiatan pada Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bersumber pada pos anggaran yang sama yaitu DAK Non Fisik BOKB. Selanjutnya, untuk kegiatan pada Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sebagian besar dibiayai dengan Dana Transfer Pusat

DAK Non Fisik PPPA sebagian kecil dibiayai dengan APBD. Selain kegiatan pada Program tersebut di atas, semuanya bersumber pada APBD.

Target realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,77%	0.796 %	155,03
2.	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,01 %	0,015%	150
3.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,94	72,77	101,15
4.	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	650	543	83,54

Pencapaian realisasi beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2023 berdasarkan data pada tabel 3.1 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pertama “Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)” dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), sesuai dengan formulasi sebagaimana disajikan pada bab sebelumnya maka hasil LPP di atas diperoleh dari (Jumlah penduduk tahun n - jumlah penduduk tahun n-1) : jumlah penduduk tahun n-1 x 100% sehingga perhitungannya :

Jumlah penduduk tahun n (2023) = 1.857.211 jiwa

Jumlah penduduk tahun n-1 (2022) = 1.842.542 jiwa, sehingga diformulasikan sebagai berikut : $((1.857.211 - 1.842.542) : (1.842.542) \times 100 = \text{LPP 2023}$

$(14.669) : (1.842.542) \times 100$

$0,00796 \times 100 = \mathbf{0,796 \%}$

2. Sasaran strategis kedua “Menurunnya laju pertumbuhan penduduk” dengan indikator kinerja Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sesuai dengan formulasi sebagaimana disajikan pada bab sebelumnya maka hasil dari penurunan LPP adalah $(\text{Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tahun } n-1) - (\text{Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tahun } n) = 0,811\% - 0,796\% = 0,015\%$.
3. Sasaran strategis ketiga “Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan” dengan indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan capaian angka Indeks Pemberdayaan Gender yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Capaian yang dihasilkan pada akhir tahun 2023 merupakan capaian IDG Tahun 2022 sebesar 72,77 , karena pada akhir tahun 2023 sampai dengan awal tahun 2024 data capaian IDG Kabupaten/Kota belum keluar/ belum dirilis.
4. Selanjutnya, untuk sasaran strategis keempat “Meningkatkan kualitas perlindungan anak” dengan indikator Nilai Kabupaten Layak Anak, dicapai angka 543. Nilai ini juga merupakan hasil penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022 yang dilaksanakan pada awal tahun 2023. Sedangkan hasil penilaian tahun 2023 belum mendapatkan nilai angka pasti karena proses penilaian baru akan berjalan di bulan Maret 2024 sesuai agenda di Kementerian PPPA.

Berdasarkan tabel 3.1 tersebut di atas, maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja DPPKBP3A tahun 2023 adalah sebesar 122,43% dengan predikat kinerja Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah/Sangat Rendah, maka capaian kinerja dapat dikelompokkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Predikat Kinerja Tahun 2023

No.	Kriteria Penilaian Predikat Kinerja	IK	%
1	Sangat tinggi	3	135,39
2	Tinggi	1	83,54
3	Sedang		
4	Rendah		
5	Sangat rendah		
Jumlah IKU		4	109,46

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Yang akan ditinjau pertama mengenai tujuan perangkat daerah, dalam hal ini tujuan DPPKBP3A adalah :

1. Tujuan

- ✓ Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk;
- ✓ Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.

a. Perbandingan Capaian Realisasi Tujuan tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Analisis yang dilakukan adalah dengan membandingkan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai bahan pertimbangan capaian yang didapat di tahun 2022 maka dengan ini kami paparkan realisasi dan Capaian Kinerja (IKU) di tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,811	0,796
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	70,10	72,77
3.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Angka	595	543

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

b. Perbandingan Capaian Realisasi Tujuan tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2023 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2023
			Target	Realisasi	%		
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,77	0,796	155,03	1,77	155,03
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	71,94	72,77	101,15	71,94	101,15
3.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Angka	650	543	83,54	650	83,54

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan data pada tabel 3.3 dan 3.4 di atas, diketahui bahwa capaian indikator tujuan ada yang mengalami kenaikan, namun ada yang terlihat mengalami penurunan. Hal ini dapat dijelaskan dengan analisis sebagai berikut:

1. Pencapaian Terhadap Target Kinerja tujuan *Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk*:

Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang bersifat negatif (semakin kecil semakin baik) pada tahun 2023 ditarget sebesar 1,77% , setelah melalui formulasi diperoleh nilai capaian pada angka 0,796%, hal ini menjadi capaian yang baik dengan capaian hingga 155,03%. Pencapaian ini dapat dicerminkan dengan keberhasilan program-program yang mendukung seperti:

- a. Program Pengendalian Penduduk dengan anggaran sebesar 672.600.000 telah mendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan, Penggerakan dalam pengumpulan data Kependudukan dan KB, Pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan dan lain-lain;
 - b. Program Pembinaan KB dengan anggaran sebesar 11.564.691.500 telah mendukung keberhasilan pelayanan KB, keaktifan dan pemberdayaan kampong KB; Fasilitasi operasional Balai Penyuluhan KB; Pembahasan rapat-rapat dan fasilitasi Kegiatan Pencegahan Stunting;
 - c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) yang semakin baik. Program Pengendalian Penduduk dengan anggaran sebesar 8.569.291.000 telah mendukung terlaksananya keberhasilan Percepatan penurunan stunting melalui fasilitasi Kegiatan Tim Pendamping Keluarga (TPK), Kegiatan Promosi Program KB, Pengadaan BKB Kit Stunting dan lainnya.
2. Pencapaian Terhadap Target Kinerja tujuan *Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak*:
- a. *Meningkatkan kualitas hidup perempuan*, tujuan ini dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tahun 2023 ditarget pada angka 71,94 terealisasi pada angka 72,77 (angka ini merupakan angka capaian riil tahun 2022 setelah IDG keluar dari BPS), karena sampai dengan dokumen ini di susun di awal tahun, hasil IDG tahun 2023 belum keluar. Program yang

mendukung dalam keberhasilan peningkatan kualitas hidup perempuan ini adalah:

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebesar 620.000.000,- telah berhasil mendukung upaya pemberdayaan perempuan pada organisasi/kelembagaan di masyarakat, pelaksanaan advokasi dan sosialisasi tentang peningkatan kompetensi bagi perempuan dan lain-lain;
 - 2) Program Perlindungan Perempuan dengan anggaran 225.604.000 mendukung dalam pencegahan dan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan;
 - 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan anggaran sebesar 77.000.000 telah mendukung terlaksananya penguatan terhadap masyarakat berupa advokasi dan sosialisasi permasalahan keluarga/kasus kekerasan yang terjadi dalam keluarga;
 - 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan anggaran sebesar 7.000.000 telah terlaksanapengelolaan data gender dan anak sesuai dengan kebutuhan.
- b. *Meningkatkan kualitas perlindungan anak*, sasaran ini dengan indikator Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA) yang pada tahun 2023 ditarget pada angka 650 terealisasi pada nilai 543 dengan nilai capaian 83,54%. Nilai tersebut juga merupakan hasil penilaian tahun 2022 karena masa penilaian tahun 2023 belum dilaksanakan. Belum tercapainya target nilai KLA tersebut salah satunya disebabkan masih belum terbentuknya kelembagaan yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak seperti di sekolah-sekolah, di wilayah (desa/kelurahan). Selain itu dalam rangka pengendalian kasus kekerasan di tiap-tiap OPD belum terlembagakan dengan baik sehingga nilai capaian pada komponen tersebut belum optimal. Program yang mendukung dalam penilaian Kabupaten Layak Anak ini adalah:
- 1) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan anggaran sebesar 7.000.000;

- 2) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan anggaran sebesar 160.000.000 telah memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan peningkatan kompetensi kelembagaan anak, Advokasi kepada masyarakat tentang Kekerasan terhadap anak dan lain-lain;
- 3) Program Perlindungan Khusus Anak dengan anggaran sebesar 293.196.000 telah memfasilitasi upaya pencegahan kasus kekerasan dan pelayanan korban kekerasan terhadap anak.

2. Sasaran

Selanjutnya analisis akan dilakukan terhadap pencapaian kinerja sasaran perangkat daerah (DPPKBP3A), yang meliputi:

- ✓ Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
- ✓ Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan
- ✓ Meningkatkan kualitas perlindungan anak

- a. Perbandingan Capaian Realisasi Sasaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Analisis yang dilakukan adalah dengan membandingkan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai bahan pertimbangan capaian yang didapat di tahun 2022 maka dengan ini kami paparkan realisasi dan Capaian Kinerja (IKU) di tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,55	0,796
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	70,10	72,77
3.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Angka	595	543

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

b. Perbandingan Capaian Realisasi Sasaran tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan Target Renstra

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023			Target 2023 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2023
			Target	Realisasi	%		
1.	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,01	0,015	150	0,01	150
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	71,94	72,77	101,15	71,94	101,15
3.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Angka	650	543	83,54	650	83,54

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Analisis dalam pencapaian sasaran DPPKBP3A hampir sama pada capaian tujuan di atas, karena indikator kinerjanya sama. Namun untuk satu sasaran berikut ini adalah sebagai berikut:

- a. *Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk* dengan indikator Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dimana indikator ini juga bersifat negatif, pada tahun 2023 di target pada angka 0,01% dan terealisasi pada angka 0,015%.

3. Analisis terhadap Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Indikator *Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)* dan *Penurunan LPP* pada kurun waktu dua tahun terakhir mengalami capaian yang cukup baik. Capaian tersebut dapat dipengaruhi juga karena menurunnya jumlah penduduk sebagai akibat merebaknya wabah Covid -19 sejak tahun 2019 hingga pertengahan 2022 dimana jumlah penduduk yang meninggal meningkat, sedangkan angka kelahiran menurun. Namun selain hal tersebut, kegiatan Bangga Kencana khususnya penyuluhan KB tidak pernah berhenti walaupun mengalami pembatasan sosial saat terjadi wabah covid. Hasilnya tentu saja angka pertumbuhan penduduk di Banyumas masih terus dapat dikendalikan karena usaha penyuluhan yang terus dilakukan secara daring (medsos).
- 2) Selanjutnya untuk indikator IDG (Indeks Pemberdayaan Gender), dimana indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Pada indikator ini salah satu

ukuran keberhasilannya adalah keterwakilan perempuan pada lembaga perwakilan DPRD, dimana sejak pemilu terakhir hanya sejumlah 11 (sebelas) orang perempuan (22%) dari total 50 anggota DPRD. Tentu saja faktor ini akan berganti seiring dengan pemilu yang akan datang, apakah akan bertambah atau menurun keterwakilan perempuannya. Kemudian faktor penentu keberhasilan IDG lainnya yaitu peranan perempuan dalam bidang ekonomi yang artinya seberapa besar jumlah perempuan yang memiliki pendapatan (penghasilan). Pada sektor ini, Banyumas belum begitu baik karena:

- belum banyak perempuan-perempuan yang berpenghasilan, artinya penghasilan perempuan di Banyumas masih karena faktor suami yang bekerja;
- terdapat buruh migran perempuan yang bekerja ke luar daerah, sehingga tidak dapat masuk dalam kategori IDG ini;
- masih banyak janda-janda yang bekerja secara mandiri namun tidak memiliki akte cerai, sehingga tidak dapat dicatat sebagai penghasilan murni perempuan.

Beberapa usaha yang dilakukan dalam rangka optimalisasi peran perempuan agar mendongkrak capaian IDG ini antara lain:

- Optimalisasi pemberdayaan organisasi perempuan dalam wadah GOW secara terus menerus dan berkelanjutan;
- Melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan bagi perempuan dengan ekonomi rentan, dimana kegiatan ini lebih banyak memberikan pembekalan keterampilan/ penyuluhan dalam rangka peningkatan ekonomi perempuan seperti pelatihan pembuatan batik, agrobisnis dan lain-lain.

C. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7
 Realisasi Anggaran Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun
 Anggaran 2023

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Keterangan (%)
DINAS		29.387.164.288	28.155.387.261	95,81
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	620.000.000	605.104.000	97,60
2.	Program Perlindungan Perempuan	225.604.000	199.920.509	88,62
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	77.000.000	75.545.500	98,11
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	7.000.000	6.346.000	90,66
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	160.000.000	159.579.100	99,74
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	218.600.000	204.428.845	93,52
7.	Program Pengendalian Penduduk	672.600.000	604.257.298	89,84
8.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	11.564.691.500	10.679.010.484	92,34
9.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	8.569.291.000	8.540.752.822	99,67
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	7.272.377.788	7.080.442.703	97,36
UPTD		99.596.000	90.896.615	91,27
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	25.000.000	19.060.615	76,24
2	Program Perlindungan Khusus Anak	74.596.000	71.836.000	96,30
Jumlah		29.486.760.288	28.246.283.876	95,80

2. Tingkat Efektivitas Penggunaan Anggaran dan Program Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2023

Selanjutnya, efektivitas anggaran yang telah digunakan terhadap capaian tujuan/sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas berdasar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
1.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	155,03	19.824.020.604	95,28
2.	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	150		
3.	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	101,15	886.916.009	95,41
4.	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	83,54	435.843.945	96,17
Jumlah				21.146.780.558	95,30

Berdasarkan tabel 3.7 dan 3.8 diketahui bahwa untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, direncanakan anggaran sebesar Rp. 29.486.760.288,-. Dari rencana anggaran tersebut untuk mewujudkan kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas terealisasi sebesar Rp. 28.246.283.876,- atau 95,80 % dari anggaran yang telah direncanakan. Pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tabel 3.8 didukung secara langsung oleh Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Perlindungan Perempuan, Program Perlindungan Khusus Anak dan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Capaian Kinerja Tahun 2023

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan sasaran strategis secara optimal dapat dilihat dalam tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.9
Tingkat Efisiensi Capaian Sasaran Strategis
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	155,03	95,28	57,23
2	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	150		
3	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	101,15	95,41	5,74
4	Meningkatkan kualitas perlindungan anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	83,54	96,17	Tidak ada

4. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Perwujudan akuntabilitas keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, selain tercermin dari realisasi anggaran pencapaian kinerja sasaran juga dapat dilihat melalui realisasi anggaran berdasarkan belanja yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran berdasarkan Belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023

No	Uraian Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1.	Belanja Operasi	29.034.528.288	27.796.667.876	95,73
2.	Belanja Modal	452.232.000	449.616.000	99,42
	Jumlah	29.486.760.288	28.246.283.876	

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Tender) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Tahun 2023, DPPKBP3A mengalokasikan Belanja Modal sebesar Rp. 452.232.000 telah dilaksanakan sebanyak 4 paket pekerjaan dengan total HPS sebesar Rp. 452.232.000, realisasi nilai kontrak sebesar Rp. 449.616.000, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.616.000 atau 0,57%.

Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam *e-Catalog* dilaksanakan dengan metode *e-Purchasing* dan pada tahun 2023 DPPKBP3A telah melaksanakan sebanyak 131 paket dengan nilai total rencana pengadaan sebesar Rp. 4.198.491.200, realisasi pengadaan sebesar Rp. 4.198.491.200.

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada kurun waktu tahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan beberapa penghargaan, sebagai berikut:

1. Penghargaan sebagai Kabupaten Penerima Parahita Ekapraya Tahun 2022 Kategori Nindya

Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan nomor penghargaan 2538/Men/KG.05/12/2023 yang diberikan di Jakarta pada 13 Desember 2023 dan diterima oleh Bapak Pj. Bupati Banyumas.





2. Penghargaan Kepala BKKBN kepada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas atas Pencapaian Hasil Pelayanan KB di atas 100%
Penghargaan ini diberikan oleh BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Tengah setelah DPPKBP3A berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pelayanan KB di tahun 2023.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, mengupas tentang pencapaian kinerja organisasi khususnya di tahun 2023.

Pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah DPPKBP3A berada pada level Sangat Baik, namun masih terdapat indikator-indikator kinerja tujuan/sasaran yang masih perlu ditingkatkan.

B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS

Progres penyelesaian isu-isu strategis tertuang pada capaian hasil indikator kinerja utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Kami menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih terus berproses dan perlu terus meningkatkan akuntabilitas yang telah dilaksanakan, dan semoga laporan ini dapat memberikan dampak terhadap hasil kinerja selanjutnya dan mampu mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*).



Purwokerto, 31 Januari 2024
KEPALA DPPKBP3A
KABUPATEN BANYUMAS
KRISIANTO, A.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740321 199501 1 001

